

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan juga memiliki peran terhadap proses pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan ini bersifat kompleks dan multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Menurut Soegijoko dalam Ibnussalam (2003), kemiskinan merupakan kondisi dimana individu atau masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya seperti sandang, perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain -lain. Artinya kemiskinan tersebut merupakan masalah mendasar yang harus ditangani secara terpadu, terintegrasi dan terencana dalam konteks pembangunan nasional dan daerah.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kemiskinan merupakan penyakit yang serius dalam aspek ekonomi pembangunan, meningkatnya angka kemiskinan akan menjadi ancaman dalam suatu

iklim perekonomian di negara tersebut, sehingga harus dihilangkan paling tidak dikurangi tujuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan karna permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, kemiskinan harus ditangani dengan serius dan upaya dalam mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara keseluruhan dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan tersekema (Nasir,DKK, 2008).

Bangsa Indonesia perlu mewaspadaai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis. Badan Pusat Statistik mencatat, indeks keparahan pada Maret 2012 sebesar 0,36. Padahal, pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukkan dua hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antar penduduk miskin dan, juga, semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp 259.520 per bulan. (BPS, 2012)

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu sasaran pertumbuhan ekonomi adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang mana berada dibawah garis

nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non - makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line).

Kemiskinan menjadi masalah terbesar di Indonesia yang belum ada solusi untuk menyelesaikannya. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Kemiskinan menjadi masalah yang pelik dan faktor - faktor yang menyebabkan kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya digaris kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (BPS jogja 2012).

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand Strategy”. Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Ketiga,

peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas (Bappeda Jateng, 2007).

Kemiskinan sendiri merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997). Besarnya ukuran standar minimum tersebut relatif menurut pendekatan mana yang digunakan. Badan Pusat Statistik Indonesia mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

Selama ini kemiskinan lebih cenderung dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi ini lebih mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Menurut World Development Report (2008), selain dilihat dari dimensi pendapatan, kemiskinan juga perlu dilihat dari dimensi lain seperti dimensi sosial, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi akses terhadap air bersih, dan perumahan.

Melalui Perda Propinsi Jawa Tengah No.8 tahun 1992 dengan pembaruan Perda Propinsi Jawa Tengah No.21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Propinsi membentuk kawasan kerjasama antar daerah yang dipandang dari potensi dan struktur ekonomi kewilayahan dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan. Berikut ini 8 (delapan) Kawasan Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah :

1. Kawasan KEDUNGSEPUR {Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kab. Grobogan (Purwadadi) dan Kota Salatiga};
2. Kawasan BARLINGMASCAKEB (Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen);
3. Kawasan PURWOMANGGUNG (Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kota Magelang dan Kab. Temanggung);
4. Kawasan SUBOSUKOWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Klaten);
5. Kawasan BANGLOR (Kab. Rembang dan Kab. Blora);
6. Kawasan WANARAKUTI (Juwana, Kab. Jepara, Kab. Kudus dan Kab. Pati);
7. Kawasan TANGKALLANGKA (Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kajen);
8. Kawasan BREGAS (Brebes, Tegal dan Slawi).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Kedungsepur
(Ribuan)

Kota / Kabupaten	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kabupaten Grobogan	184.1	184.5	186.5	199	210.8	227.8	233.7
Kabupaten Demak	158.8	160.9	162	172.5	178.1	192.5	198.8
Kabupaten Semarang	80.7	81.2	79.8	83.2	88.8	96	97.9
Kabupaten Kendal	107.8	109.3	110.5	117.7	119	128.6	130.4
Kota Salatiga	9.7	10.6	10.8	11.5	12.3	13.3	14.2
Kota Semarang	83.6	84.3	84.7	86.7	81.9	88.5	79.7

Sumber : Badan Pusat Statistik 2010 - 2016

Berdasarkan table 1.1 diatas menunjukkan angka kemiskinan di wilayah Kedungsepur dalam kurun waktu 2010 – 2016 , tiap – tiap kota / kabupaten memiliki keberagaman masing – masing. Ada yang memiliki kecenderungan jumlah penduduk miskin naik tiap tahun , kecenderungan jumlah penduduk miskin turun tiap tahun , dan ada pula yang fluktuatif tiap tahunnya. Kemiskinan di Wilayah Kedungsepur merupakan persoalan yang serius maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian tentang faktor - faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan variabel : pendidikan(rata – rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional (UMR). Penelitian ini

akan dilaksanakan di wilayah Kedungsepur yang terdiri dari 6 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk dilakukan penelitian ialah:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Kedungsepur?
2. Bagaimana pengaruh kesehatan (angka harapan hidup) terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Kedungsepur?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Kedungsepur?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Kedungsepur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Wilayah Kedungsepur.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh kesehatan (angka harapan hidup) terhadap kemiskinan di Wilayah Kedungsepur.

3. Menganalisis bagaimana pengaruh pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap kemiskinan di wilayah Kedungsepur.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap kemiskinan di wilayah Kedungsepur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintahan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan dalam persoalan kemiskinan. Penelitian ini juga dapat menjadi tolak ukur untuk merancang kebijakan mengenai kemiskinan di Wilayah Kedungsepur.
2. Bagi Masyarakat menambah wawasan dan memahami tentang hubungan kemiskinan dengan PDRB, kesehatan (angka harapan hidup) pengaruh pendidikan (angka harapan hidup), dan Upah Minimum Regional (UMR).
3. Bagi penulis sendiri, dengan harapan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan disamping pemahaman tentang teori dan konsep yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami secara lebih jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, penjabaran tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori - teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka akan membentuk suatu kerangka pemiliran dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian. Selain itu bab ini juga akan menguraikan mengenai analisis data dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis obyek penelitian.

5. Bab V Penutup

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran - saran bagi pihak yang berkepentingan.